

**RANCANGAN KERJA (RENJA) AKHIR
TAHUN 2019**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat diselesaikan.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terkait dengan Program dan Kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan. Ini dimaksudkan untuk menjadi usulan Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan KUA-PPAS sampai kepada penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, agar supaya pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik, lancar dan berkesinambungan.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rencana Kerja ini, dengan harapan dapat berguna dalam pencapaian target pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada khususnya dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya.

Kuala Tungkal, Juni 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Ir. H. TAHARUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19620312 199009 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2017 DISKOMINFO	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017.....	9
2.2 Analisis Pelaksanaan Pelayanan Diskominfo	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO	16
3.1 Visi dan Misi Diskominfo	16
3.2 Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Diskominfo	19
3.3 Strategi dan Kebijakan	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	25
BAB VII PENUTUP.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Realisasi Anggaran Diskominfo Kab. Tanjab Barat Tahun Anggaran 2017	11
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Indikator saasaran Jangkah Menengah Pelayanan Diskominfo	20
Tabel 3.1	Hubungan Hirarki antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	23
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2019	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja perangkat daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan terlaksananya kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun sebelumnya akan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD yang menjadi acuannya. Renja Perangkat Daerah memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, RTRW dan RPJPD. Sebaliknya Renja Perangkat Daerah dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 adalah untuk melaksanakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan prakiraan maju Tahun 2019 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan kedalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi Arah Kebijakan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan Diskominfo;
2. Mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Optimalisasi pelaksanaan program-program sesuai dengan yang diharapkan melalui fokus pada program-program prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III TUJUAN, SASARAN DISKOMINFO

- 3.1 Visi dan Misi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo
- 3.3 Strategi dan Kebijakan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFO

- 4.1 Rencana Program
- 4.2 Rencana Kegiatan

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Secara garis besar sesuai tugas dan fungsi Diskominfo, kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika baru berjalan selama 1 (satu) Tahun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbentuk pada akhir tahun 2016 dan baru memulai di tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2019;
2. Pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
3. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Realisasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
				Rp.	%
I.	PENDAPATAN		Rp 200.000.000,00	Rp 278.020.000,00	139,01%
	1.	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 200.000.000,00	Rp 278.020.000,00	139,01%
II.	BELANJA		Rp 6.921.388.350,00	Rp 6.091.013.857,00	88,00%
III.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		Rp 3.039.927.000,00	Rp 2.416.343.357,00	79,49%
	1.	GAJI	Rp 2.385.927.000,00	Rp 1.854.102.707,00	77,71%
	2.	TKD	Rp 654.000.000,00	Rp 562.240.650,00	85,97%
VI.	BELANJA LANGSUNG		Rp 3.881.461.350,00	Rp 3.674.670.500,00	94,67%
	1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 1.403.165.800,00	Rp 1.309.746.350,00	93,34%
	1.	Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2.250.000,00	Rp 2.220.000,00	98,67%
	2.	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Rp 1.001.080.000,00	Rp 917.286.150,00	91,63%
	3.	Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 79.750.000,00	Rp 79.732.500,00	99,98%
	4.	Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 21.995.100,00	Rp 21.992.550,00	99,99%
	5.	Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 43.989.950,00	Rp 43.621.450,00	99,16%
	6.	Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Rp 11.050.000,00	Rp 10.800.000,00	97,74%
	7.	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Rp 2.850.750,00	Rp 2.763.750,00	96,95%
	8.	Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 6.000.000,00	Rp 5.770.000,00	96,17%
	9.	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 4.200.000,00	Rp 3.745.000,00	89,17%

	10.	Keg. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 230.000.000,00	Rp 221.814.950,00	96,44%
	2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp 310.051.200,00	Rp 281.564.500,00	94,80%
	11.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 84.209.200,00	Rp 82.060.000,00	97,45%
	12.	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Rp 53.792.000,00	Rp 53.630.200,00	99,70%
	14.	Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan Gedung Kantor	Rp 22.700.000,00	Rp 22.585.000,00	99,49%
	3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Rp 22.875.000,00	Rp 21.750.000,00	95,08%
	15.	Keg. Penyediaan Pakain Dinas beserta perlengkapannya	Rp 22.875.000,00	Rp 21.750.000,00	95,08%
	4.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp 25.000.000,00	Rp 24.466.300,00	97,87%
	16.	Keg. Pengembangan SDM	Rp 25.000.000,00	Rp 24.466.300,00	97,87%
	5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Rp 305.050.000,00	Rp 302.324.150,00	99,11%
	17.	Keg. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi	Rp 200.000.000,00	Rp 197.301.050,00	98,65%
	18.	Keg. Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Informasi	Rp 105.050.000,00	Rp 105.023.100,00	99,97%
	6.	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Rp 229.820.000,00	Rp 210.392.000,00	91,55%
	19.	Keg. Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	Rp 107.820.000,00	Rp 107.332.000,00	99,55%
	20.	Keg. Peyediaan Pelayanan Jasa Sandi dan Telekomunikasi	Rp 122.000.000,00	Rp 103.060.000,00	84,48%
	7.	PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI	Rp 977.289.350,00	Rp 958.841.600,00	98,11%

		21.	Keg. Pengembangan Telematika	Rp 263.389.350,00	Rp 261.349.250,00	99,23%
		22.	Keg. Peningkatan dan Pemutakhiran Situs Web	Rp 292.600.000,00	Rp 290.915.400,00	99,42%
		24.	Keg. Operasional Sekretariat LPSE Tanjab Barat	Rp 185.300.000,00	Rp 171.806.700,00	92,72%
	8.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI		Rp 608.210.000,00	Rp 565.585.600,00	92,99%
		25.	Keg. Peningkatan Mutu dan Program Siaran RSPD	Rp 232.260.000,00	Rp 196.000.000,00	84,39%
		26.	Keg. Kemitraan Media dan Publikasi	Rp 375.950.000,00	Rp 369.585.600,00	98,31%

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa 8 (Delapan) program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 terealisasi rata-rata diatas 90 persen, hal ini menunjukkan kinerja yang baik, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat diserap secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih profesional, proaktif dan kolektif/tim, sehingga diharapkan dimasa akan datang menjadi personil yang mumpu dan kapabel bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/aparatur antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau memproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;

3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (*sustainable*);
5. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang telah dianggarkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun anggaran 2017 telah mencapai target keluaran yang diharapkan dengan tingkat pencapaian realisasi anggaran di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2017 relatif tinggi.

Alokasi dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2017 sebesar **Rp. 6.921.388.360,-** yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 3.039.927.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.416.343.357,-** atau **79,49 %**, efisiensi anggaran sebesar **Rp. 623.583.643** atau **20,51%** dan
2. Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.881.461.350,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.674.670.500,-** atau **94,67 %**, efisiensi anggaran sebesar **Rp. 206.790.850**, atau **5,33 %**.

Disamping sebagai dinas teknis yang merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menjadi salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berupa retribusi Menara Telekomunikasi. Pada tahun anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan target pendapatan asli daerah (PAD) melalui kegiatan pendapatan retribusi daerah sebesar **Rp. 200.000.000,-** dan dapat terelialisasi sebesar **Rp. 278.020.000** atau **139,1%**, ini menunjukkan kinerja yang sangat ditinggi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO

3.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai dasar dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat dalam pengembangan teknologi informasi merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

VISI.

“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Terintegrasi dengan Berbasis Teknologi Informasi Untuk Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat tersebut diatas didefinisikan sebagai berikut :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan sistem informasi melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Tersedianya jaringan yang lebih luas berupa WAN dan LAN (Internet dan Intranet) pada SKPD yang prioritas di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang handal, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi informasi berbasis website, audio dan visual dengan dukungan dana yang memadai.

MISI.

Untuk dapat merealisasikan visi terwujudnya pelayanan publik yang terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Telah menetapkan misi sebagai langkah atau strategi untuk mencapai visi tersebut.

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Mewujudkan ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan sistem informasi melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi.
- b. Mewujudkan penyediaan jaringan interkoneksi WAN dan LAN pada SKPD di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Meningkatkan layanan informasi pembangunan daerah (SIMDA) yang handal, berdaya dan berhasil guna yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi berbasis website, audio dan audio visual dengan Dukungan Pendanaan yang memadai.

Berdasarkan paparan Misi diatas, yang dimaksud dengan :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur (SDA) di bidang teknologi informasi dan komunikasi, untuk mengelola sistem yang berada dilingkungan Kab. Tanjung Jabung Barat, berupa pengadministrasian computer pada jaringan yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat dengan mempersiapkan jaringan dalam menjalankan aplikasi serta Meningkatkan literasi (kemampuan) dan profesionalisme Kinerja Kelembagaan adalah upaya untuk mengatur dan meningkatkan fungsi dan peran perangkat kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat berdasarkan kewenangan dan kondisi daerah dalam rangka peningkatan Kinerja Pemerintah dan mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi sekaligus sebagai upaya modernisasi system administrasi pemerintah menuju terwujudnya E-Government (tata kelola pemerintah berbasis elektronik).

2. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi secara efektif dan efisien adalah menyiapkan infrastruktur jaringan informasi yang berbasis teknologi di lingkungan Pemerintah, guna memudahkan user melakukan komunikasi dan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi berupa aplikasi yang terintegrasi agar dapat diimplementasikan dalam kegiatan di OPD sehingga data dapat terangkum secara terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat dan dapat memanfaatkan fasilitas jaringan internet/intranet serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat.
3. Meningkatkan serta mewujudkan ketersediaan data/informasi secara cepat dan akurat serta keterpaduan sistem informasi antara Pusat dan Daerah dan antar Daerah, strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kuantitas data dan letak geografis pemrosesannya untuk mempercepat proses arus komunikasi di lingkungan kerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan aplikasi yang dituangkan dalam pola induk pengembangan fasilitas informasi dan komunikasi data dan sinergi pembangunan daerah yang partisipatif dan membuka keterhubungan informasi antara pemerintah pusat dengan daerah, antar daerah, dunia usaha dan sector-sektor lainnya untuk meningkatkan pelayanan informasi multi media kepada publik yang terprogram, akuntabel melalui website Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai perwujudan penerapan e-Government di lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat dan meningkatkan kerjasama, kemitraan serta memberdayakan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dengan masyarakat, lembaga media massa.
4. Meningkatkan serta mewujudkan ketersediaan data/informasi secara cepat dan akurat serta keterpaduan sistem informasi antara Pusat dan Daerah dan antar Daerah, strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kuantitas data dan letak geografis pemrosesannya untuk mempercepat proses arus komunikasi di lingkungan kerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan aplikasi yang dituangkan dalam pola induk pengembangan fasilitas informasi dan komunikasi data untuk menciptakan

keterpaduan dan sinergi pembangunan daerah yang partisipatif dan membuka keterhubungan informasi antara pemerintah pusat dengan daerah, antar daerah, dunia usaha dan sector-sektor lainnya dan meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta memberdayakan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dengan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum.

MOTTO

Mendorong percepatan pencapaian Visi dan Misi, maka dirumuskan Motto Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

“KOMUNIKASI INFORMASI TERARAH CEPAT DAN AKURAT”

3.2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan merupakan uraian dari misi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dapat disampaikan sebagai berikut : Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pemanfaatan TIK dan Layanan Informasi Publik	Persentase Partisipasi aktif lembaga komunikasi Publik dalam pengelolaan komunikasi Publik
			IKM Layanan Website Tanjab Barat
		Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam Pengamanan Informasi	Persentase Pemanfaatan Hosting dan Collocation
			Persentase OPD yg memiliki aplikasi E-Government
2.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dasar Komunikasi dan Informatika yang berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan data dan Informasi yang terpercaya dan Berkualitas	Persentase rilis data yang akurat dan tepat waktu

3.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wewenang, visi, misi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal

yang telah diidentifikasi, ditetapkanlah strategi pembangunan Komunikasi dan Informatika yang merupakan arah yang akan dilaksanakn untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

Strategi Sektor Komunikasi dan Informatika :

- a. Membangun Jaringan Komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Meningkatkan jumlah OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat terhubung jaringan internet
- c. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- d. Mengembangkan dan menyelenggarakan system pelayanan informasi public
- e. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kab. Tanjung Jabung Barat melalui pemamfaatan teknologi informasi dan kimunikasi
- f. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media.
- h. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang TIK

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menentukan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan beberapa kebijakan pembangunan untuk lima tahun kedepan yaitu :

- a. Membangun saluran komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Melaksanakan Pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet lingkup pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
- c. Meningkatkan pengawasan menara telekomunikasi .
- d. Membangun system layanan informasi publik

- e. Menyelenggaran penilaian dan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Kab. Tanjung Jabung Barat
- f. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
- g. Melaksanakan penyelenggaran layanan komunikasi pendukung penerapan e-Government di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- h. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang bersertifikat di bidang TIK

Hubungan hirarkis antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 3.3

Hubungan Hirarki antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pemanfaatan TIK dan Layanan Inforamasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan dan Menyelenggarakan system pelayanan Informasi Publik - Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui pemamfaatan TIK 	<p>3 Membangun system Layanan Informasi Publik</p> <p>4 Menyelenggaran penilaian dan pembinaan kelompok masyarakat berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi di Kab. Tanjung Jabung Barat</p>
	Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam Pengamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Penyelenggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Elektronik - Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik - Melaksanakan penyelenggaran layanan komunikasi pendukung penerapan e-Government di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dasar Komunikasi dan Informatika yang berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan data dan Informasi yang terpercaya dan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang TIK - Membangun Jaringan Komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. - Meningkatkan jumlah OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat terhubung jaringan internet - Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikas 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang bersertifikat di bidang TIK - Membangun Saluran Komunikasi Data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Melaksanakan Pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet lingkup pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat - Meningkatkan Pengawasan Menara Telekomunikasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat difokuskan pada upaya menunjang pelaksanaan tugas pembangunan di bidang komunikasi dan informatika diarahkan kepada peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), sehingga tercipta aparatur yang mampu menangani masalah-masalah komunikasi dan informatika secara kompeten dan profesional, upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar *stakeholders*, sehingga akan terwujud program yang bersinergi, upaya peningkatan pelayanan publik yang berpengaruh terhadap pos-pos pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan peran kelembagaan/instansi untuk memperoleh dukungan anggaran agar program-program kerja dan kegiatan dapat terealisasi.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yaitu perubahan pada program pokok yang sebelumnya berjumlah 4 (empat) program menjadi 3 (tiga) program pokok, pada tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 8 program yang terdiri dari 5 program rutin dan 3 program pokok yang merupakan hasil dari penyusunan renja tahun sebelumnya, antara lain :

- A. Program pelayanan administrasi perkantoran, yang meliputi 10 kegiatan, antara lain :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan.
 9. Penyediaan Makanan dan Minuman.
 10. Rapat – Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
- B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang meliputi 4 kegiatan, antara lain :
1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- C. Program peningkatan Disiplin aparatur, yang meliputi 1 kegiatan, yakni
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
- D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi 2 kegiatan, antara lain :
1. Pengembangan SDM.
- E. Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan, yang meliputi 3 kegiatan, antara lain :
1. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
 2. Sinkronisasi penyusunan Renja, RKA, Perubahan RKA, LKj dan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja.
- F. Program Layanan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Opini Publik, yang meliputi 10 kegiatan, antara lain :
1. Fasilitasi Kemitraan Layanan Komunikasi Publik.
 2. Pemuktakhiran Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat.

3. Pembangunan dan Pemeliharaan Portal Perangkat Daerah
 4. Penyediaan Jasa Hosting
 5. Peliputan dan Dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah
 6. Pembinaan, Pengembangan dan Pemeberdayaan KIM
 7. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
 8. Layanan Media Komunikasi Publik
 9. Layanan Komunikasi dan Informasi di Taman Pintar
 10. Pengembangan Studio Editing Multimedia
- G. Program Peningkatan Tata Kelola Pemeritahan Berbasis Elektronik, yang meliputi 7 kegiatan, yakni :
1. Sekretriati LPSE.
 2. Maintance Perangkat LPSE
 3. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi E-Government
 4. Pemeliharaan Aplikasi Online
 5. Rapat Teknis PPID
 6. Respon Opini Publik
 7. Inventarisasi dan Pengelolaan Opini Publik
- H. Program Pembangunan, Pengawasan dan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi, meliputi 7 kegiatan, antara lain :
1. Pengambangan dan Pemeliharaan Telematika.
 2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 3. Pembinaan dan Pengawsan Penyelenggaraan Penyiaran.
 4. Pengawasan dan Pengendalian Data Informasi
 5. Penyediaan Pelayanan Jasa Sandi
 6. Pengelolaan Data dan Statistik Komunikasi dan Informatika
 7. Sosialisasi Internet Sehat dan Aman

RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PROGRAM KEGIATAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2019

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 yang tetuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 terdiri 8 (delapan) program yang didanai oleh APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2020	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
[01]	Program Pelayanan Adminstrasi perkantoran	<i>Berjalanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar (rata-rata bulan)</i>			<i>Rp 1.097.219.998,00</i>				<i>Rp 1.350.500.200,00</i>
01	<i>Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>Jumlah materai pertahun</i>	<i>DISKOMINFO</i>	<i>665 Lembar</i>	<i>Rp 2.850.000,00</i>	<i>APBD</i>		<i>675 Lembar</i>	<i>Rp 2.985.000,00</i>
02	<i>kegiatan Penyediaan jasa kominikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rata-rata bulan)</i>	<i>DISKOMINFO</i>	<i>12 bulan</i>	<i>Rp 133.800.000,00</i>	<i>APBD</i>		<i>12 bulan</i>	<i>Rp 147.180.000,00</i>
07	<i>Kegiatan Penyediaan jasa adminstrasi Keuangan</i>	<i>Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan</i>	<i>DISKOMINFO</i>	<i>22 Orang</i>	<i>Rp 127.990.000,00</i>	<i>APBD</i>		<i>22 Orang</i>	<i>Rp 140.789.000,00</i>
08	<i>Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	<i>Tersedianya dan terpeliharanya kebersihan kantor (rata-rata bulan)</i>	<i>DISKOMINFO</i>	<i>12 bulan</i>	<i>Rp 21.547.153,00</i>	<i>APBD</i>		<i>12 bulan</i>	<i>Rp 23.785.700,00</i>
10	<i>Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor</i>	<i>Jumlah jenis alat tulis kantor</i>	<i>DISKOMINFO</i>	<i>52 Jenis</i>	<i>Rp 49.408.190,00</i>	<i>APBD</i>		<i>53 Jenis</i>	<i>Rp 51.890.400,00</i>
11	<i>Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan</i>	<i>Tersedianya Barang cetak dan Peggandaan selama 1 tahun</i>	<i>DISKOMINFO</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>Rp 27.706.360,00</i>	<i>APBD</i>		<i>12 bulan</i>	<i>Rp 28.458.400,00</i>
12	<i>Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Gedung Kantor (rata-rata bulan)</i>	<i>DISKOMINFO</i>	<i>12 bulan</i>	<i>Rp 3.038.295,00</i>	<i>APBD</i>		<i>12 bulan</i>	<i>Rp 3.386.700,00</i>
15	<i>Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah koran berlangganan</i>	<i>DISKOMINFO</i>	<i>6 Koran</i>	<i>Rp 6.000.000,00</i>	<i>APBD</i>		<i>12 bulan</i>	<i>Rp 6.000.000,00</i>
17	<i>Kegiatan Penyediaan makan dan minum</i>	<i>Tersedianya Makanan dan Minuman rapat selama 1 Tahun</i>	<i>DISKOMINFO</i>	<i>12 bulan</i>	<i>Rp 4.200.000,00</i>	<i>APBD</i>		<i>12 bulan</i>	<i>Rp 4.200.000,00</i>

	18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Berjalannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (rata-rata bulan)	DISKOMINFO	12 bulan	Rp 720.680.000,00	APBD		12 bulan	Rp 941.825.000,00
[02]	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak guna bagi aparatur			Rp 809.141.478,00				Rp 699.375.000,00
	07 Kegiatan Pengadaan peralatan dan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	DISKOMINFO	8 Item	Rp 524.891.478,00	APBD		12 bulan	Rp 365.750.000,00
	20 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	DISKOMINFO	1 unit gedung	Rp 79.500.000,00	ABPD		1 unit gedung	Rp 87.450.000,00
	22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	DISKOMINFO	15 unit Roda Dua 4 unit roda empat	Rp 189.250.000,00	ABPD		15 unit Roda Dua 4 unit roda empat	Rp 208.175.000,00
	26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	DISKOMINFO	22 Unit	Rp 15.500.000,00	ABPD		22 Unit	Rp 38.000.000,00
[03]	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur			Rp 32.624.400,00				Rp 35.886.840,00
	02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	DISKOMINFO	65 stel PDH	Rp 32.624.400,00	ABPD		67 stel PDH	Rp 35.886.840,00
[05]	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN sesuai kompetensi			Rp 40.000.000,00				Rp 100.000.000,00
	05 Kegiatan pengembangan SDM	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	DISKOMINFO	8 Aparatur	Rp 40.000.000,00	ABPD		20 Aparatur	Rp 100.000.000,00
[06]	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian SAKIB			Rp 40.340.000,00				Rp 44.374.000,00
	04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	DISKOMINFO	2 Dokumen	Rp 14.650.000,00	APBD		2 Dokumen	Rp 16.115.000,00

	28 Sinkronisasi Penyusunan Renja, RKA, Perubahan RKA, Lkj dan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun	DISKOMINFO	5 Dokumen	Rp 25.690.000,00	APBD	5 Dokumen	Rp 28.259.000,00
[21]	Program Layanan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Opini Publik	Tersedianya layanan informasi dan komunikasi publik			Rp 595.565.000,00			Rp 857.772.243,00
	01 Kegiatan Fasilitasi Kemitraan layanan Komunikasi publik	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Penguatan Layanan Komunikasi Publik	DISKOMINFO	3 TV	Rp 177.000.000,00	ABPD	3 TV	Rp 194.700.000,00
	02 Kegiatan Pemuktahiran Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah Pengunjung Website Tanjab Barat	DISKOMINFO	40.000 Pengunjung	Rp 80.400.000,00	ABPD	40.000 Pengunjung	Rp 88.440.000,00
	03 Kegiatan Penyediaan Jasa Hosting	Tersedianya Hosting Service untuk Kepentingan Pemerintah Kab. Tanjab Barat	DISKOMINFO	12 Kali	Rp 90.150.000,00	ABPD	12 Kali	Rp 99.165.000,00
	04 Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah Berita Kegiatan Pemkab Tanjab Barat yang dirilis	DISKOMINFO	360 Berita	Rp 137.800.000,00	ABPD	360 Berita	Rp 151.580.000,00
	05 Kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan KIM	Jumlah KIM yang dibentuk, dibina, dan diberdayakan	DISKOMINFO	3 KIM	Rp 25.995.000,00	ABPD	3 KIM	Rp 105.943.868,00
	06 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentsi (PPID)	Daftar Informasi Publik	DISKOMINFO	1 DIP	Rp 53.820.000,00	ABPD	1 DIP	Rp 184.503.375,00
	07 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyiaran	Jumlah lembaga penyiaran yang dibina dan diawasi dan Jumlah Berita Radio yang dipublish	DISKOMINFO	4 Lembaga Penyiaran	Rp 30.400.000,00	ABPD	4 Lembaga Penyiaran	Rp 33.440.000,00
[22]	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis elektronik	Jumlah OPD dengan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik			Rp 103.700.000,00			Rp 114.070.000,00
	02 Kegiatan Sekretariat LPSE	Terlaksananya Layanan Informasi Pengguna SPSE bagi Penyedia dan Non Penyedia	DISKOMINFO	12 bulan	Rp -	APBD	12 bulan	Rp -
	03 Kegiatan Maintance Perangkat LPSE	Terlaksananya Pengecekan dan Service Berkala Perangkat LPSE	DISKOMINFO	12 bulan	Rp -	APBD	12 bulan	Rp -

	04 Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi E-Government	Jumlah Aplikasi Online	DISKOMINFO	3 Aplikasi	Rp 51.500.000,00	APBD		3 Aplikasi	Rp 56.650.000,00
	07 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Portal Perangkat Daerah	Jumlah Sub Domain	DISKOMINFO	44 Sub Domain	Rp 52.200.000,00	ABPD		44 Sub Domain	Rp 57.420.000,00
[23]	Program Pembangunan, Pengawasan dan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terintegrasinya jaringan komunikasi data antar OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat			Rp 1.427.500.000,00				Rp 3.084.750.000,00
	01 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Telematika	Tersedianya Jaringan Komunikasi Data dan Bandwidth Jumlah Menara Telekomunikasi yang diawasi	DISKOMINFO	44 OPD 105 Menara	Rp 1.305.000.000,00	APBD		44 OPD 105 Menara	Rp 2.950.000.000,00
	04 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Data Informasi	Jumlah OPD yang menyampaikan data tepat waktu	DISKOMINFO	10 OPD	Rp 64.900.000,00	APBD		10 OPD	Rp 71.390.000,00
	05 Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Sandi	Jumlah Kecamatan yang terlayani dengan Sandi dan Radio SSB	DISKOMINFO	6 Kecamatan	Rp 57.600.000,00	APBD		6 Kecamatan	Rp 63.360.000,00
JUMLAH TOTAL					Rp 4.146.090.876,00				Rp 6.286.728.283,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2019 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholders* terutama bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja 2019 sangat ditentukan oleh kesiapan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan staf Diskominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renja 2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Hal-hal yang dapat dilakukan pada saat evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika 2019 adalah target dan indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dari tema pembangunan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 harus benar-benar menjadi acuan kerja bagi bidang-bidang dan sub bidang secara khusus dan Dinas Komunikasi dan Informatika pada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua dapat melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, kredibel dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) Diskominfo dan kinerja pegawainya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Ir. H. TAHARUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19620312 199009 1 001